

**PENYELESAIAN SENGKETA KEPEMILIKAN SERTIFIKAT GANDA
BERDASARKAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 24 TAHUN 1997 DI
KABUPATEN BANYUWANGI
(STUDI KASUS SENGKETA TANAH DI KELURAHAN KLATAK
KABUPATEN BANYUWANGI)**

Oleh

Galang Mahendra Ardiansyah, NIM. 1714101066

Program Studi Ilmu Hukum

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui, (1) bagaimana pelaksanaan prosedur pendaftaran tanah demi menjamin kepastian hukum dan hak atas tanah yang termuat dalam PP nomor 24 tahun 1997 sehingga tidak menimbulkan terjadinya sengketa mengenai sertifikat ganda yang ada di Banyuwangi, serta (2) bagaimana peran Kantor Badan Pertanahan di Banyuwangi untuk menjamin kepastian hukum dalam penyelesaian terhadap kepemilikan sertifikat ganda untuk menjamin kepastian hukum. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum empiris, dengan sifat penelitian deskriptif. Lokasi penelitian ini dilaksanakan di Kantor Badan Pertanahan Kabupaten Banyuwangi. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah dengan cara studi dokumen, observasi, dan wawancara. Teknik penentuan sampel yang digunakan adalah Teknik Non Probability Sampling. Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) Mengenai prosedur pendaftaran harus sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 agar dapat berdampak positif bagi masyarakat antara lain akan menciptakan rasa aman bagi pemilik hak atas tanah, membantu mempermudah masyarakat dalam memperoleh hak milik atas tanah, memungkinkan perekonomian masyarakat lebih maju, mempermudah peralihan hak. (2) Mengenai peran dan tindakan yang dilakukan BPN Kabupaten Banyuwangi untuk menjalankan tugasnya dalam menyelesaikan sengketa tanah hak milik bersertifikat ganda disini adalah dengan melaksanakan putusan pengadilan. Putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, yang berkaitan dengan penerbitan, peralihan, pembatalan hak atas tanah dan/atau pembatalan penetapan tanah terlantar, dilaksanakan berdasarkan permohonan pihak yang berkepentingan melalui Kantor Pertanahan setempat.

Kata Kunci : Peran Kantor Badan Pertanahan, Sengketa Tanah, Sertifikat Ganda.

**SETTLEMENT OF DUAL CERTIFICATE OWNERSHIP DISPUTES BASED
ON PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 24 TAHUN 1997 IN
BANYUWANGI REGENCY**

**(CASE STUDY OF LAND DISPUTE IN KELURAHAN KLATAK,
BANYUWANGI REGENCY)**

By

Galang Mahendra Ardiansyah, NIM. 1714101066

Legal Studies Program

ABSTRACT

This study aims to find out, (1) how to implement land registration procedures to ensure legal certainty and land rights as contained in PP number 24 of 1997 so as not to cause disputes regarding dual certificates in Banyuwangi, and (2) how the role of the Land Agency Office in Banyuwangi is to ensure certainty. law in the settlement of the ownership of multiple certificates to ensure legal certainty. The type of research used is empirical legal research, with the nature of descriptive research. The location of this research was carried out at the Land Agency Office of Banyuwangi Regency. Data collection techniques used are document studies, observations, and interviews. The sampling technique used is the Non Probability Sampling Technique. The results show (1) Regarding the registration procedure, it must be in accordance with PP Nomor 24 Tahun 1997 so that it can have a positive impact on the community, including creating a sense of security for owners of land rights, helping to make it easier for people to obtain property rights to land, enabling the community's economy to be more advanced, and facilitating the transfer of rights. (2) Regarding the role and actions taken by the BPN Kabupaten Banyuwangi to carry out its duties in resolving land disputes with dual certificates, here is to implement court decisions. Court decisions which have permanent legal force, relating to the issuance, transfer, cancellation of land rights and/or cancellation of the determination of abandoned land, are carried out based on the request of interested parties through the local Land Office

Keywords: *The Role of the Land Agency Office, Land Disputes, Multiple Certificates.*